

## RINGKASAN

**Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di Instalasi Rekam Medis RSUD Haji Jawa Timur, Zulfa Maria Mudlikah (G41211331), Tahun 2024, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Dr. dr. Rinda Nurul Karimah M.Kes (Pembimbing).**

Rumah sakit adalah institusi yang menyediakan layanan kesehatan komprehensif, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tugas utama rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan berkualitas yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, dengan fokus pada pelayanan medis spesialisik dan subspecialistik. Di tengah tantangan global dan persaingan ketat, rumah sakit harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti akreditasi, harapan pasien, serta perbaikan kualitas pelayanan, sambil menjaga keseimbangan antara kualitas dan pengelolaan biaya untuk memastikan keberlanjutan operasional.

Seiring dengan perubahan kebijakan sektor kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang menggantikan sistem kelas rawat inap sebelumnya dengan sistem terstandarisasi berdasarkan jenis kepesertaan JKN. Kebijakan ini bertujuan memastikan kesetaraan layanan bagi seluruh peserta JKN, baik PBI maupun non-PBI, dengan memberikan layanan sesuai dengan tingkat perawatan yang dibutuhkan.

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, rumah sakit pemerintah tipe B dengan akreditasi paripurna, berperan penting dalam mendukung program JKN. Dalam beberapa tahun terakhir, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pasien rawat inap peserta JKN, yang berdampak pada indikator kinerja rumah sakit, seperti *Bed Occupancy Rate* (BOR) dan *Bed Turn*

*Over* (BTO). Peningkatan jumlah pasien ini menunjukkan peningkatan kapasitas pelayanan, sehingga perlu ada perbaikan dalam efisiensi penggunaan tempat tidur.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis kesiapan implementasi kebijakan KRIS di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn.

Implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur menghadapi beberapa tantangan terkait dengan standar dan sasaran kebijakan. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 telah menetapkan tujuan besar terkait jaminan kesehatan yang terstandarisasi, kejelasan dan sosialisasi kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan oleh RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Hal ini menyebabkan kebijakan KRIS belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh staf, termasuk di Instalasi Rekam Medis, sehingga pengarahannya belum terstruktur dengan baik, hal ini akan mempengaruhi efektivitas implementasi nantinya. Selain itu, kesenjangan dalam pemahaman dan standar pelaksanaan kebijakan ini dapat menghambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Pada implementasi kebijakan KRIS terkait dengan kesiapan sumber daya, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur telah memiliki staf rekam medis yang kompeten dan cukup untuk menjalankan kebijakan ini. Sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman, serta jumlah staf yang memadai, menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan KRIS. Pada sisi sarana dan prasarana, rumah sakit juga telah menyediakan perangkat komputer untuk mendukung proses administrasi rekam medis yang lebih efisien. Namun, staf belum memiliki pemahaman terkait kebijakan KRIS, sehingga kebijakan KRIS belum disosialisasikan secara efektif terhadap prosedur dan alur kerja. Selain itu, faktor lingkungan eksternal, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik, mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini, dengan adanya kebutuhan untuk dukungan lebih lanjut dari manajemen dan kebijakan pemerintah.